

RENCANA KERJA

Renja Tahun 2025



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, dengan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipanya, sehingga penyusunan Rencana Kerja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang

dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Tasikmalaya, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya,



Asep Darisman, S.Sos.,MM
NIP 19680101 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KERJA DPMD TAHUN 202310**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Dan Fungsi Perangkat Daerah 32

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
RKPD 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat 45

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH 46**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan
Nasional 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat
Daerah..... 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH..... 52

BAB V PENUTUP..... 69

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 70

5.2 Rencana Tindak Lanjut 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.....	31
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya	36
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya	45
Tabel 3.2.1	Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49
Tabel 3.2.2	Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50
Tabel 3.2.3	Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51
Tabel 3.2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	53
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2025	54
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tindak Lanjut Renja dalam Proses Penyusunan APBD.....	2
------------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD, Renstra PD hasil evaluasi kegiatan periode sebelumnya.

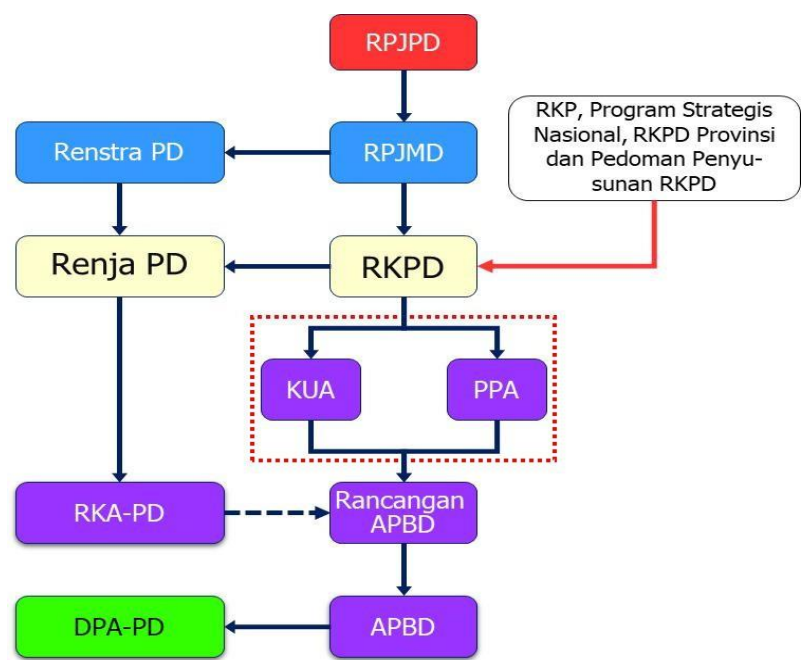
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pemutakhiran rencana kerja dari Rencana Strategia Perangkat Daerah yang disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;

- 3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Rancangan Awal RKPD;
- 4. Penyusunan Rancangan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Forum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/lintas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
- 5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Perkada tentang RKPD;
- 6. Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tindak lanjut dokumen Renja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.1.
Tindak Lanjut Renja dalam Proses Penyusunan APBD



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 –

2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

23. Surat Edaran Bupati Nomor : 0006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 dimaksudkan untuk mensinergikan program regional dan sectoral, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 atau sumber dana lainnya;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan atau kecamatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan proiritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahswan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan yang dikelompokan berdasarkan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD	63	30,92	57	64	112,28	59	0	0
						Nilai IKM Dinas PMD	79,60	79,61	77,61	83	106,94	78,61	0	0
01	201				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	6	6	6	100	6	2	47
01	201	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat	12	3	3	3	100	3	1	58

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	201	02			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	3	3	3	100	3	1	58
01	201	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	0	0	0	0	0	0	0
01	202				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	400%	200	100	100	100	100	25	81
01	202	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.664	672	336	336	100	420	104	20
01	206				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	400%	69	100	100	100	100	25	24
01	206	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	12	12	12	100	1	0	50
01	206	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15	12	3	3	100	1	0	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	206	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	37	12	8	8	100	3	1	57
01	206	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	12	12	12	100	5	1	52
01	206	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	48	12	12	12	100	12	3	56
01	206	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	12	12	12	100	12	3	56
01	206	11			Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	1	1	100	0	0	100
01	207				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	400%	200	100	100	100	100	0	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	207	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	30	8	0	0	0	0	0	0
01	207	05			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	220	110	0	0	0	2	0	50
01	207	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	43	7	15	15	100	8	0	51
01	207	07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1		0			0	0	0
01	207	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1		0			0	0	0
01	208				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	400%	62	100	100	100	100	25	47

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	208	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	12	12	12	100	12	3	56
01	208	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	0	0	0	0	0	0	0
01	208	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	12	12	12	100	12	3	56
01	209				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400%	40	100	100	100	100	10	38

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	209	01			Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	52	13	20	20	100	15	3	67
01	209	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	52	12	10	10	100	15	0	42
01	209	09			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	1	1	1	100	0	0	50
2	13	03			Program peningkatan kerjasama desa	Cakupan Fasilitasi kerjasama desa	400	100	100	100	100	100	200	50
2	13	03	201		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen kerjasama antar desa yang terfasilitasi	509	2	1	1	100	2	0	1
2	13	03	201	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	251		0				0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	03	201	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	7	2	1	1	100	2	0	43
2	13	03	201	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	251		0				0	0
2	13	02			Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	400	60	100	100	100	100	20	45
2	13	02	201		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukann Penataan status Desa	1.324	702	351	351	100	290	20	81
2	13	02	201	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	321		0			0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	02	201	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	321	351	0	0	0	0	0	109
2	13	02	201	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	321	351	351	351	100	351	20	225
2	13	02	201	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	20		0			0	0	0
2	13	02	201	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	20		0			0	0	0
2	13	02	201	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	321		0			0	0	0
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	500	131	100	100	100	100	50	56

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	04	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang sesuai aturan	500	131	100	100	100	100	50	56
2	13	04	201	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.404		0			0	0	0
2	13	04	201	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	300		0			0	0	0
2	13	04	201	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.053		0			351	0	0
2	13	04	201	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1.404	351	351	351	100	351	20	41

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	04	201	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	192.000	1193	0	0	0	4586	2000	54
2	13	04	201	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.053					0	0	0
2	13	04	201	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1.053					0	0	0
2	13	04	201	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	801					50	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	04	201	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	351		67	67	100	0	0	19
2	13	04	201	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	240					0	0	0
2	13	04	201	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1.053					351	0	0
2	13	04	201	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1.053					0	0	0
2	13	04	201	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1.053					351	0	0
2	13	04	201	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	8.424		7	7	100	351	64	1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	04	201	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1.053					0	0	0
2	13	04	201	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.053					0	0	0
2	13	04	201	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1.404	351				0	0	0
2	13	04	201	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.053					0	0	0
2	13	05		03	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat , Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	1.839	1	3	3	100	6	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	05	201	03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Desa yang mendapatkan Pembinaan	1.839	1	3	3	100	6	0	0
2	13	05	201	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	4					0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	05	201	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4					0	0	0
2	13	05	201	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	255		1	1	100	2	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	05	201	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS, TMMD.)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	121					1	0	0
2	13	05	201	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29					0	0	0
2	13	05	201	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	18					1	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	05	201	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3		1	1	100	1	0	33
2	13	05	201	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3					0	0	0
2	13	05	201	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4	1	1	1	100	1	0	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	13	05	201	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	456					0	0	0
2	13	05	201	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	420					0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan fungsinya:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dan bidang potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
3. Penyelenggaraan administrasi desa;
4. Penyelenggaraan penataan dan kerja sama desa;
5. Penyelenggaraan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan dan dana desa;
7. Penyelenggaraan potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
9. Pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional.

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah didasarkan pada sasaran strategis, berikut sasaran strategis yang menjadi ukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya kerja sama desa;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas.

Upaya pemberdayaan masyarakat sangatlah berarti untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaannya harus menjadi agenda yang selalu dikedepankan sejalan dengan falsafah Demokrasi Pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

1. Masalah Internal
 - a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sarana dan prasarana belum memadai;
 - c. Penganggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan.
2. Masalah Eksternal
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya

gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa serta belum terencananya program pembangunan di desa secara baik;

- b. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di pedesaan dan masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha;
- c. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan rendahnya kinerja kelembagaan pemerintahan desa sehingga belum tertibnya administrasi desa;
- d. Masih banyaknya desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah.

Untuk menjabarkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dan target sasaran yang ditetapkan serta proyeksi untuk tahun 2021-2026, berikut tabelnya :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK/SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	29.06	32.76	34.47	35.9	64.95	32.76	34.47	35.9	
2	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0.57	0.57	0.57	3.42	0	0.57	0.57	3.42	
3	Persentase Posyandu aktif	%	98.23	98.35	98.42	98.56	100	98.35	98.42	98.56	
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor	62	65	70	70	39.86	65	70	70	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa “Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang- kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing- masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indicator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang- kurangnya adalah indikator keluaran (output)”.

Berdasarkan definisi dan penjelasan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari peraturan diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan IKU sesuai dengan core business yang diemban. Adapun urusan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yaitu, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari urusan ini telah dirumuskan IKU yang dirasa mewakili sasaran pada setiap urusan yang diemban.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat terkait peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018;
- b. Kurangnya pembinaan terkait Teknologi Tepat Guna;
- c. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih kurang;
- d. Belum adanya Perbup tentang Penetapan Penegasan Batas Desa berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016;

Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah antara lain:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa;
- b. Peningkatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa;
- c. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tantangan

Dalam Pengembangan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tasikmalaya dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut;
2. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistic dan individualistic;
3. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan social masyarakat;
4. Kecenderungan heterogenitas tatanan social masyarakat;
5. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsive, konsisten dan akuntabel;
6. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

b. Peluang

Selain tantangan tersebut diatas, terdapat pula peluang-peluang antara lain:

1. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk menoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat;
2. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar;
3. Adanya komitmen Pemerintah Pusat terhadap program percepatan pembangunan di Indonesia

Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dampak terhadap visi misi Kepala Daerah, peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Penggalian potensi desa dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
4. Peresmian Anggota BPD dan Kepala Desa serentak se-Kab. Tasikmalaya;
5. Administrasi kewilayahan desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang Rencana Kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	105.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	105.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/ bulan	3.900.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/ bulan	3.900.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	99.999.300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	99.999.300	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.941.500	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.941.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	19.998.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	19.998.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	200.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 unit	60.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 unit	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	100.280.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	100.280.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	219.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	219.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	283.801.238	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	283.801.238	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	181.650.800	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	181.650.800	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	13 Unit	55.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	13 Unit	55.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	
	PROGRAM PENATAAN DESA					PROGRAM PENATAAN DESA					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa					Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa					
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	351 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	351 Unit	200.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	351 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	351 Dokumen	150.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	351 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen	351 Dokumen	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Pengelolaan Keuangan Desa			
	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	9.021.294.488	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	9.021.294.488	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	351 Dokumen	84.430.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	351 Dokumen	84.430.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	600.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	600.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Profil Desa	351 Dokumen	80.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Profil Desa	351 Dokumen	80.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	351 Dokumen	122.500.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	351 Dokumen	122.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	300.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	351 Orang	300.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	351 Desa	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	351 Desa	200.000.000	
	Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan					Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	2.800.000.000	Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	2.800.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan/Fasilitasi TTG	1 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan/Fasilitasi TTG	1 Laporan	150.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi BBGRM	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	150.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.500.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.500.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan musrenbang maupun forum SKPD dapat diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan rencana pembangunan daerah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025
dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diupayakan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Sehubungan dengan kedudukan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025 – 2045) serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025 - 2029. RKP 2025 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025 – 2045, menuju visi Indonesia Emas 2045. Mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

Sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun delapan agenda pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yakni (1) Mewujudkan transformasi sosial; (2) Mewujudkan transformasi ekonomi; (3) Mewujudkan transformasi tata kelola; (4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; (5) Memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi; (6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan (7) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta (8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Dari 8 (delapan) prioritas nasional diatas, yang selaras dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya antara lain pada point (6) Mewujudkan

pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Point 6 (enam) dari prioritas nasional ini didukung oleh Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

Selain prioritas nasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga melakukan penelaahan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2025-2026 untuk tahun 2025, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025.

Adapun Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya;
2. Reformasi sistem Pendidikan, pemajuan kebudayaan pendidikan agama dan kehidupan beragama;
3. Penguatan sistem kesehatan daerah;
4. Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
5. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa;
6. Inovasi pelayanan publik, penataan daerah dan stabilisasi politik, hukum baik asasi manusia dan keamanan.

Dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya terhadap Prioritas Pembangunan Jawa Barat untuk Tahun 2025 adalah terhadap gerakan membangun desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan pada factor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yang hendak dicapai adalah “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”. Dalam mencapai visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Misi Ke-3 (Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata).

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :”Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa”.

Tabel 3.2.1
Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
1	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	22%
		Persentase Posyandu aktif	100%
		Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel	80%
		Cakupan sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik	80%
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65%

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan

- desa;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa :
 3. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa;
 4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah.

Tabel 3.2.2
Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1	Peningkatan Kemandirian Desa	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri
					Persentase Posyandu aktif
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel
				Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Cakupan sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3.2.3
Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	22%
		Persentase Posyandu aktif	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel	80%
3	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Cakupan sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik	80%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65%

Tabel 3.2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	34.47
2	Persentase peningkatan kerjasama desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	0.57
3	Persentase Posyandu aktif	Persentase Posyandu aktif	98.42
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	70

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi terhadap pencapaian misi ke – 3 yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata”.

Berkaitan dengan pencapaian SDGs yang merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 tujuan. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan tujuan ke – 16 yaitu “Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat (peace, justice and strong institution) yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua serta membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di segala lapisan untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, usulan program kegiatan dan sub kegiatan juga harus mendukung program pengentasan kemiskinan. Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program dimana salah satunya sesuai dengan program kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yaitu dengan adanya pengembangan budaya usaha.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan
1	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Program : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Program : Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Program : Penataan Desa Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa Program : Peningkatan Kerja Sama Desa Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umunm Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat janji Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025 sangat erat. Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 beserta fokusnya yaitu:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka prevalensi stunting
3. Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4. Mitigasi dan penanggulangan bencana
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem
6. Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan
7. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro
8. Inovasi pelayanan publik
9. Peningkatan kemandirian desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sesuai tujuannya mendukung point 9 (Sembilan) yaitu Peningkatan Kemandirian Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	Peningkatan Kemandirian Desa	Program Penataan Desa		
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	200.000.000	
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa		
		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa		

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	450.000.000	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	150.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	250.000.000	
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	9.021.294.488	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	200.000.000	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	184.430.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	80.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	122.500.000	
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	300.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	200.000.000	
		Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.800.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	150.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	550.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000	

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 terdiri dari 5 program yang dijabarkan

dalam 10 kegiatan dan 33 kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evalausi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa;
 - 1) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitas Kerjasama Desa;
 - 1) Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 1) Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 2) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - 3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 4) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - 5) Fasilitas Penyusunan Profil Desa
 - 6) Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
 - 7) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas/Kelurahan (RT, RW.PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 3) Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - 4) Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Unit
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13				Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								22.293.895. 326				22.743.895.3 26	DPMD
2.13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP, Nilai IKM Dinas PMD				61 poin dan 79,01 poin								DPMD
2.13	01.2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													DPMD
2.13	01.2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya		3 Dokumen		105.000.000	DAU	Dokumen	3	130.000.000		DPMD
2.13	01.2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Kab. Tasikmalaya		3 Laporan		20.000.000	DAU	Laporan	3	45.000.000		DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2.13	01.2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												DPMD	
2.13	01.2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya		34 Orang/Bulan		3.900.000.00 0	DAU	Orang/ Bulan	30	3.925.000.000	DPMD	
2.13	01.2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah												DPMD	
2.13	01.2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya		12 Paket		99.999.300	DAU	Paket	12	124.999.300	DPMD	
2.13	01.2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya		1 Paket		20.941.500	DAU	Paket	1	45.941.500	DPMD	
2.13	01.2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya		12 Paket		50.000.000	DAU	Paket	12	75.000.000	DPMD	
2.13	01.2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya		12 Dokumen		19.998.000	DAU	Dokumen	12	44.998.000	DPMD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Unit
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	01.2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Kab. Tasikmalaya		12 Laporan		200.000.000	DAU	Laporan	12	225.000.000	DPMD
2.13	01.2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tasikmalaya		12 Laporan		220.000.000	DAU	Laporan	12	245.000.000	DPMD
2.13	01.2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													DPMD
2.13	01.2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		55 unit		60.000.000	DAU	Unit	55	85.000.000	DPMD
2.13	01.2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		10 unit		100.280.000	DAU	Unit	10	125.280.000	DPMD
2.13	01.2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													DPMD
2.13	01.2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Kab. Tasikmalaya		12 Laporan		219.000.000	DAU	Laporan	12	244.000.000	DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Unit
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	01.2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Tasikmalaya		12 Laporan		283.801.238	DAU	Laporan	12	308.801.238	DPMD
2.13	01.2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													DPMD
2.13	01.2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraaan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Kab. Tasikmalaya		13 Unit		181.650.800	DAU	Unit	13	206.650.800	DPMD
2.13	01.2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara		Kab. Tasikmalaya		13 Unit		55.000.000	DAU	Unit	13	80.000.000	DPMD
2.13	01.2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kab. Tasikmalaya		1 Unit		300.000.000	DAU	Unit	1	325.000.000	DPMD
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa												DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Unit
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	02.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa													DPMD
2.13	02.2	01	05	Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Tasikmalaya		1 Laporan		100.000.000	DAU	Laporan	1	125.000.000	DPMD
2.13	02.2	01	06	Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		Kab. Tasikmalaya		351 Unit		200.000.000	DAU	Unit	351	225.000.000	DPMD
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa												DPMD
2.13	03.2	01		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa													DPMD
2.13	03.2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		450.000.000	Bankek Khusus Provinsi	Dokumen	1	475.000.000	DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Unit
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggara an Pemerintahan Desa yang Baik				351 Desa								DPMD
2.13	04.2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													DPMD
2.13	04.2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Kab. Tasikmalaya		351 Dokumen		150.000.000	DAU	Dokumen	351	175.000.000	DPMD
2.13	04.2	01	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Kab. Tasikmalaya		351 Dokumen		250.000.000	DAU	Dokumen	351	275.000.000	DPMD
2.13	04.2	01	05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		Kab. Tasikmalaya		351 Orang		9.021.294.488	DAU	Orang	48000	9.046.294.488	DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	04.2	01	08	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Kab. Tasikmalaya		351 Dokumen		200.000.000	DAU	Dokumen	351	109.430.000	DPMD
2.13	04.2	01	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian		Kab. Tasikmalaya		1 Laporan		184.430.000	DAU	Laporan	1	200.000.000	DPMD
2.13	04.2	01	11	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa		Kab. Tasikmalaya		351 Dokumen		80.000.000	DAU	Dokumen	351	105.000.000	
2.13	04.2	01	13	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		Kab. Tasikmalaya		351 Dokumen		122.500.000	DAU	Dokumen	351	147.500.000	
2.13	04.2	01	14	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		Kab. Tasikmalaya		351 Orang		300.000.000	DAU	Orang	351	325.000.000	
2.13	04.2	01	15	Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		Kab. Tasikmalaya		351 Desa		200.000.000	DAU	Desa	351	225.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Unit
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	04.2	01	18	Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		200.000.000	DAU	Dokumen	1	0	
2.13	05			Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Desa Yang Aktif												DPMD
2.13	05.2	01		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota													DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	05.2	01	03	Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya		Kab. Tasikmalaya		1 Lembaga		2.800.000.000	DAU	Lembaga	1	2.825.000.000	DPMD
2.13	05.2	01	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kab. Tasikmalaya		1 Laporan		150.000.000	DAU	Laporan	1	175.000.000	DPMD
2.13	05.2	01	07	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Kab. Tasikmalaya		1 Laporan		550.000.000	Bankeu Khusus Provinsi	Laporan	1	575.000.000	DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penanggung
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
2.13	05.2	01	09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Kab. Tasikmalaya		1 Dokumen		1.500.000.000	DAU	Dokumen	1	1.500.000.000	DPMD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah Program Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja perangkat daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Renja dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berjalan dengan baik, dan juga dapat mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk: Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tasikmalaya, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya,



Asep Darisman, S.Sos.,MM
NIP 19680101 198803 1 007